

2024

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA**

TAHUN 2024

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAGETAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dapat tersusun naskah Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan PPPA) Kabupaten Magetan Tahun 2024.

Rencana Kerja Tahunan yang disusun tiap tahun ini digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran untuk mendanai program – program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Selain itu untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program / kegiatan yang akan dilaporkan dalam LKjIP tahun 2024 nanti.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahunan ini sebagai penjabaran / pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan PPPA) Kabupaten Magetan tahun 2024 - 2026 yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga semua isi yang terkandung dalam Rencana Kerja ini mengacu pada dokumen ReNstra dimaksud.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2024 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar pemikiran perencanaan kinerja maupun anggaran pada tahun – tahun yang akan datang.

Magetan, Agustus 2023
KEPALA DINAS PPKB PP DAN PA
KABUPATEN MAGETAN

Dra. FURIANA KARTINI
Pembina Utama Muda
NIP 19660421 199003 2 013

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	41
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	43
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024	44
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT..	57
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	58
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	58
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	60
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	62
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	62
BAB V PENUTUP	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam menyelenggarakan manajemen Pemerintahan Perangkat Daerah wajib menyusun Rancangan Rencana Kerja. Rancangan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen rencana program / kegiatan yang disusun setiap tahun dan merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Rancangan Rencana Kerja sekaligus menjadi tolok ukur pencapaian kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai salah satu lembaga pemerintah Kabupaten Magetan sesuai dengan Perda No. 5 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja, kedudukan tugas dan fungsi Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan yang secara umum adalah untuk mewujudkan keluarga-keluarga Indonesia yang mempunyai anak ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera, berketahanan, dan terpenuhi hak-hak reproduksinya. Untuk melaksanakan tugas yang diembannya tersebut, Dinas PPKB PP dan PA menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai acuan / kerangka kerja dalam perencanaan anggaran dan penetapan kinerja tahun 2024.

Dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini berisi sasaran kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024 berikut indikator – indikator sarasannya. Selain itu juga diuraikan tentang program / kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan Program / Kegiatan yang telah dilakukan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5679)
 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312).
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2005 - 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022; (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2021 nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan nomor 116)
18. Peratusran Bupati Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023
19. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk memadukan prioritas kegiatan pembangunan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (SKPD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024, mengevaluasi capaian indikator kinerja Renstra, menetapkan target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini adalah untuk menjamin keberlanjutan Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Magetan, memberikan pedoman bagi Bidang-bidang yang ada di Dinas PPKB PPPA Kabupaten Magetan dalam rangka mencapai target Renstra. Selain hal tersebut hasil / keluaran penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini adalah untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan serta sumber pembiayaannya yang digunakan pada tahun anggaran 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

TABEL 1.1

TABEL SISTEMATIKA PENULISAN RENJA RKPD KAB. MAGETAN TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN		
1.1.	Latar Belakang	Dasar pertimbangan perlunya dilakukan perubahan RKPD yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah (gambaran struktur perubahan APBD)
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3.	Maksud dan Tujuan	Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD.
1.4	Sistematika Penulisan	Berisi tentang sistematika penyajian/ penyusunan Renja Perangkat Daerah
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	Memuat hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun n-2 dan perkiraan capaian n-1, dikaitkan dengan target capaian renstra
2.2	Analisi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) dan SPM maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK)
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Berisikan permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang dalam pelayanan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta isu-isu strategis lainnya
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan pada masyarakat dan poengumpulan informaoi dan pengamatan lapangan
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Telaahan terhadap Kebijakan nasional dan sebagaimana maksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Derah (pencapaian IKU dan IKD tahun direncanakan)
3.3	Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan yang akan dilaksnakan pada tahun direncanakan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		

Memberikan informasi program &Kegiatan tahun rencana, target capaian kinerja beserta pagu indikatifnya

BAB V PENUTUP

Berisikan hal-hal penting lainnya dianggap perlu Juga dicantumkan tanggal, nama kepala Perangkat Daerah dan Stempel

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Hasil Evaluasi Renja tahun 2022, capaian Renstra dan proyeksi pencapaian Renja 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas PPKB PP dan PA
Dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2022

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Program dan Kegiatan tahun Lalu						Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2023 yang dievaluasi		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
1.1.1	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Ketersediaan Data Kependudukan %	100	%		%											0	%
1.1.1.1	Pendataan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan Dokumen	5	Dokumen	2	Dokumen											40,00	%
1.1.1.2	Fasiltasi Kegiatan Koalisi Kependudukan	Jumlah Pertemuan Koalisi Kependudukan Kegiatan	20	Kegiatan	0	Kegiatan											0,00	%
1.1.1.3	Biaya Umum dan Pendamping DAK Bidang Pengendalian Penduduk	Persentase Penyelenggaraan DAK Bidang Pengendalian Penduduk %	4	Kegiatan	2	Kegiatan											50,00	%

1.1.2	Program Advokasi dan Pendayagunaan Sumberdaya Lini Lapangan	Cakupan tenaga lini lapangan yang kompeten %	100	%		%										0,00	%
1.1.2.1	Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kali	60	Kegiatan	12	Kegiatan										20,00	%
1.1.2.2	Pendayagunaan Tenaga PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD diberi Honorarium (dan pembinaan) Orang	6875	Orang	1375	Orang										20,00	%
1.1.3	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) %	35	%		%										0,00	%
1.1.3.1	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Akseptor	1800	Akseptor	350	Akseptor										19,44	%
1.1.4	Program Keluarga Berencana	Prosentase Capaian CPR %	73,5	%		%										0,00	%
1.1.4.1	Percepatan Revitalisasi Program KB, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan Revitalisasi program KB, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan	30	Kegiatan	6	Kegiatan										20,00	%
1.1.4.2	Pelayanan KIE	Jumlah Calon peserta KB yang mendapatkan pelayanan KIE Akseptor	550	Akseptor	42	Akseptor										7,64	%
1.1.4.3	Pembinaan Kelompok Keluarga Berencana	Jumlah peserta pembinaan kelompok keluarga KB Orang	500	Orang	20	Orang										4,00	%

1.1.4.4	Fasilitasi Kasus Komplikasi/Kegagalan KB	Jumlah Fasilitasi Kasus Komplikasi/kegagalan KB Kali	42	orang	4	orang												9,52	%
1.1.5	Program Bina Ketahanan Keluarga	Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga %	75	%		%												0,00	%
1.1.5.1	Pembinaan Kader Bina Keluarga	Jumlah Kader Bina Keluarga Yang Mendapatkan Pembinaan Orang	2215	Orang	470	Orang												21,22	%
1.1.6	Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Cakupan anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB %	75	%	55	%												73,33	%
1.1.6.1	Pembinaan dan Peningkatan Usaha Pengelolaan Kelompok UPPKS	Jumlah peserta pembinaan dan peningkatan usaha UPPKS Orang	1000	kelompok	200	kelompok												20,00	%
1.1.7	Program Kesehatan Reproduksi	Prevalensi Peserta Papsmea %	3,5	%		%												0,00	%
1.1.7.1	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu (Fasilitasi Pelayanan PAP SMEARS)	Jumlah Peserta Pap Smear peserta	3500	peserta	350	peserta												10,00	%
1.1.8	Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB	Persentase Jangkauan pelayanan KB %	100	%		%												0,00	%
1.1.8.1	Peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan serta kelengkapan sarana kerja, penggerakan dan pembinaan program KKBPK	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan, Kelengkapan sarana Kerja, Penggerakan dan Pembinaan Program KKBPK pada Balai Penyuluhan KB %	100	%	100	%												100,00	%

1.1.8.2	Pengadaan sarana pengolahan dan pelaporan data/informasi bidang keluarga berencana	Jumlah Pengadaan Laptop unit	20	unit	20	unit												100,00	%
1.1.8.3	Pengadaan Sarana Kerja bgai PPKBD	Jumlah Pengadaan sarana kerja bagi PPKBD Paket	155	Paket	76	Paket												49,03	%
1.1.8.4	Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB	Jumlah Alat Penyimpan Alat Obat Ko9ntrasepsi pada Fasilitas Kesehatan KB unit	22	unit	13	unit												59,09	%
1.1.9	Program Generasi Berencana	Median Usia Kawin Pertama Perempuan	25	Tahun		Tahun												0,00	%
1.1.9.1	Pengembangan Pusat Informasi Konseling Remaja	Jumlah PIK Baru yang akan dibentuk dan Lomba- Lomba PIK R	132	kelompok	6	kelompok												4,55	%
2.1.1	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Prosentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta %	45	%		%												0,00	%
2.1.1.1	Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah Peserta Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam mengelola Usaha Orang	900	Orang	6	Orang												0,67	%
2.1.1.2	Peningkatan SDM bagi Organisasi Wanita	Jumlah Peserta Pembinaan Peningkatan SDM bagi Organisasi Wanita Orang	900	Orang	6	Orang												0,67	%
2.1.1.3	Pelatihan Peningkatan Peran serta dan kesetaraan jender	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan jender	150	Orang	150	Orang												100,00	%

		Kesetaraan Gender Orang																	
2.2.1	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan Pemenuhan Kriteria Kota Layak Anak %	80	%		%												0,00	%
2.2.1.1	Sosialisasi Koordinasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan KLA	Jumlah Dokumen Indikator KLA Yang Disusun Dokumen	5	Dokumen	2	Dokumen												40,00	%
2.2.2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Korban KDRT Yang Mendapatkan Penanganan %	100	%		%												0,00	%
2.2.2.1	Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan PUG; Profil Data Gender dan Anak Dokumen	10	Dokumen	2	Dokumen												20,00	%
2.2.2.2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Jumlah Korban KDRT Yang Difasilitasi Orang	500	Orang	95	Orang												19,00	%
2.2.2.3	Penyusunan Profil Gender dan Anak	Jumlah Dokumen profil data gender yang disusun Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen												100,00	%
1.1.1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan Kinerja dan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu %	100	%		%												0,00	%

1.1.1.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen	45	Dokumen	9	Dokumen												20,00	%
1.1.1.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah Dokumen	15	Dokumen	3	Dokumen												20,00	%
1.1.1.3	Evaluasi dan Rencana Operasional Program PPKB dan PPPA (Rakerda)	Jumlah Peserta Evaluasi dan Rencana Operasional Program PPKB dan PPPA Orang	1000	Orang	0	Orang												0,00	%
2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang layak Fungsi %	100	%		%												0,00	%
2.1.2.1	Fasilitasi Forum Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja bagi Kelompok Sebaya di Luar Sekolah	Jumlah Genre Kit untuk Kelompok PIK Remaja Paket	30	Paket	0	Paket												0,00	%
2.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Dibeli unit	15	Unit	3	Unit												20,00	%
2.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung/Kantor Yang Dipelihara unit	95	Unit	19	Unit												20,00	%
2.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara unit	40	Unit	8	Unit												20,00	%
3.1.3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat Skor	82	Skor		Skor												0,00	%
3.1.3.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan Pelayanan	100	%	33,72	%												33,72	%

		Administrasi Perkantoran %																	
3.1.3.2	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Survey Masyarakat Dokumen	5	Dokumen	1	Dokumen											20,00	%	
3.1.3.3	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase Pemenuhan : Perjalanan Dinas Aparat	100	%	97,55	%												97,55	%
2.14.0 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Ketersediaan Data Kependudukan %		%	100,0 0	%	100	%	75,6 3	%	75,6 3	%			87, 82	%	87,82	%	
2.14.0 2.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Ketersediaan data kependudukan	100	%	100,0 0	%	100	%	96,1 7	%	96,1 7	%			98, 09	%	98,09	%	
2.14.0 2.2.01. 05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	jumlah Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	3	kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	100	%			2	kegiatan	67	%	
2.14.0 2.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan data kependudukan	100	%	98,00	%	100	%	121, 40	%	121, 40	%			10 9,7 0	%	109,7 0	%	
2.14.0 2.2.02. 03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	%			2	dokumen	67	%	

2.14.0 2.2.02. 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Keluarga	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	%			2	dokumen	67	%
2.14.0 2.2.02. 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Tersedianya Dukungan Pembiayaan Pengelolaan BOKB dan Penurunan Stunting	24	Bulan		Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	%			12	Bulan	50	%
2.14.0 3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Tenaga Lini Lapangan yang Kompeten / Persentase Capaian CPR	100	%	100,00	%	100	%	92,46	%	92,46	%			96,23	%	96,23	%
2.14.0 3.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Capaian CPR	100	%	100,00	%	100	%	97,08	%	97,08	%			98,54	%	98,54	%
2.14.0 3.2.01. 04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%			24	bulan	67	%
2.14.0 3.2.01. 05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Persentase Dukungan Manajemen BOKB dan Media KIE	100	%	100	%			-	%	#DIV/0!	%			100,00	%	100,00	%

2.14.0 3.2.01. 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Proram KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Prosentase Pertemuan Rapat Koordinasi	100	%			100	%	99,98	%	99,98	%			99,98	0	99,98	%
2.14.0 3.2.01. 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan yang Mendapat Dukungan Operasional Kegiatan	18	balai peny			18	balai peny	18,00	balai peny	100	%			18,00	0	100,00	%
2.14.0 3.2.01. 08	Pengendalian Program KKBPK	Persentase Penyelenggaraan DAK Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana	100	%	100	%	100	%	94,64	%	94,64	%			97,32	%	97,32	%
2.14.0 3.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Capaian CPR	100	%	100	%	100	%	99,86	%	99,86	%			99,93	%	99,93	%
2.14.0 3.2.02. 01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Persentase Pemberian Biaya Operasional Pembinaan Program oleh Kader PPKBD/ Sub PPKBD	100	%	100	%	100	%	99,93	%	99,93	%			99,97	%	99,97	%
2.14.0 3.2.02. 03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	24	Bulan			12	Bulan	12,00	Bulan	100,00	%			12,00	0	50,00	%

2.14.0 3.2.02. 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD diberi honorarium (dan pembinaan)	4.134	orang	1.378	orang	1378	orang	1.378	orang	100	%			2.756	orang	67	%
2.14.0 3.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian CPR	73,02	%	73,02	%	73,02	%	73,02	%	100,00	%			73,02	%	100,00	%
2.14.0 3.2.03. 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang Terdistribusi Alokasi	37	faskes	37	faskes	37	faskes	37	faskes	100	%			74	faskes	200	%
2.14.0 3.2.03. 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	4.972	akseptor	200	akseptor	2386	akseptor	2.386	akseptor	100	%			2.586	akseptor	52	%
2.14.0 3.2.03. 04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	60	kasus	20	kasus	20	kasus	7	kasus	35	%			27	kasus	45	%
2.14.0 3.2.03. 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	43	unit	24	unit	19	unit	19	unit	100	%			43	unit	100	%
2.14.0 3.2.03. 07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah calon peserta KB yang mendapatkan Pelayanan KIE	210	orang	70	orang	70	orang	70	orang	100	%			140	orang	67	%

2.14.0 3.2.03. 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Calon Akseptor yang terlayani KB MKJP	4.591	akseptor	4.591	akseptor	37	faskes	37	akseptor	100	%			4.628	akseptor	101	%
2.14.0 3.2.03. 09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah peserta Papsmeas yang terlayani	225	akseptor	225	akseptor	225	orang	225	akseptor	100	%			450	akseptor	200	%
2.14.0 3.2.03. 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang Mendapat Biaya Operasional	18	balai peny	18	balai peny			-	balai peny	#DIV/0!	%			18	balai peny	100	%
2.14.0 3.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Capaian CPR	73,02	%	73,02	%	73,02	%	73,02	%	100,00	%			73,02	%	100,00	%
2.14.0 3.2.04. 01	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	jumlah Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	9	kegiatan	3	kegiatan	3	kegiatan	1	kegiatan	33	%			4	kegiatan	44	%
2.14.0 3.2.04. 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Prosentase biaya operasional kegiatan KKBPK di Kampung KB	100	%	100,00	%	100	%	100,00	%	100,00	%			100,00	%	100,00	%

2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga	100	%	100,00	%	100	%	32,13	%	32,13	%			66,07	%	66,07	%
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan keluarga yang mengikuti bina ketahanan keluarga	100	%	100,00	%	100	%	32,03	%	32,03	%			66,01	%	66,01	%
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dibentuk dan mendapatkan pembinaan	12	klp	4	klp	4	klp	4	klp	100	%			8	klp	67	%
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana penyiapan Kehidupan berkeluarga bagi remaja	12	klp	20	paket	4	Kelompok	4	Kelompok	100	%			24	paket	200	%

2.14.0 4.2.01. 05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Bina Keluarga yang mendapatkan Pembinaan dan Biaya Operasional	705	kader	235	kader	235	kader	235	kader	100	%			470	kader	67	%
2.14.0 4.2.01. 06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Pemberian Biaya Operasional Penanganan stunting	100	%	96,68	%			-	%	0	%			48,34	%	48,34	%
2.14.0 4.2.01. 07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta kegiatan Promosi dan Sosialisasi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	360	orang	120	orang	120	orang	120	orang	100	%			240	orang	67	%
2.14.0 4.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Cakupan keluarga yang mengikuti bina ketahanan keluarga	65	%	65,00	%	65	%	65	%	100	%			65	%	100	%

	Kesejahteraan Keluarga																	
2.14.0 4.2.02. 02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta pertemuan dalam rangka Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	160	orang	80	orang	80	orang	-	orang	-	%			80	orang	50	%
2.14.0 4.2.02. 03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Peserta Pembinaan dan peningkatan usaha UPPKS	160	orang	80	orang	80	orang		orang		1 %				orang		1 %
2.08.0 3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya Jumlah Kekerasan kepada Perempuan	80	skor	80	skor	80	%	80	%	100	%			80	skor	100	%

2.08.0 3.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta	80	skor	80	skor	1,51	%	1,51	%	100,00	%			40,76	skor	50,94	%
2.08.0 3.2.03. 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Kekerasan yang difasilitasi dan didampingi	2	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	%			2	dokumen	100	%
2.08.0 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Untuk tercapainya KLA	76	%	76	%	76	%	76	%	100	%			76	%	100	%
2.08.0 6.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Tercapainya KLA	76	%	76	%	76	%	76	%	100	%			76	%	100	%
2.08.0 6.2.01. 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media 150 orang dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	%			2	dokumen	100	%
2.08.0 2	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase Perempuan di Lembaga Legislatif , Pemerintah dan Swasta	100	%	100	%	100	%	46,65	%	46,65	%			73,32	%	73,32	%

2.08.0 2.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	100	%	100	%	43	%	0,00	%	0,00	%			50,00	%	50,00	%
2.08.0 2.2.01. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Peserta dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	6	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	-	dokumen	-	%			2	dokumen	33	%
2.08.0 2.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	10	%	10	%	43	%	43	%	100	%			27	%	265	%
2.08.0 2.2.02. 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi partisipasi perempuan	12	orang	40	orang	40	orang	36	orang	90	%			76	orang	633	%
2.08.0 7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Peningkatan SDM Masyarakat tentang Bahaya Kekerasan	10	Kegiatan			10	Kegiatan	5	Kegiatan	50	%			5	0	50	%
2.08.0 7.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan	10	Kegiatan			10	Kegiatan	5	Kegiatan	50	%			5	0	50	%

2.08.0 7.7.01. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan SDM pada masyarakat	10	Kegiatan			10	Kegiatan	5	Kegiatan	50	%			5	0	50	%
2.08.0 7.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan	27	Orang			27	Orang	1	Orang	4	%			1	0	4	%
2.08.0 7.2.02. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan yang ditangani	1	Korban			27	Korban	1	Korban	4	%			1	0	100	%
2.08.0 7.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Manajemen Peningkatan SDM	3	kegiatan			3	kegiatan	1	kegiatan	33	%			1	0	33	%
2.08.0 7.2.03. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat	Peningkatan Kapasitas SDM Penanganan Kasus	3	kegiatan			3	kegiatan	1	kegiatan	33	%			1	0	33	%

	Daerah Kabupaten/Kota																	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,5	skor	80,5	skor	80,5	%	skor	100	%	skor	100	%				
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	14	dokumen	14	dokumen	14	dokumen	14	dokumen	100	%	28	dokumen	200	%		
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan	24	dokumen	8	dokumen	8	dokumen	8	dokumen	100	%	16	dokumen	67	%		
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan	18	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	100	%	12	dokumen	67	%		
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,5	%	80,5	%	80,5	%	80,50	%	100,00	%	80,50	%	100,00	%		
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji	26	bulan	14	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	26	bulan	100	%		
2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan	24	bulan	12	bulan	2	dokumen	2	dokumen	100	%	14	bulan	58	%		

2.14.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,5	%	80,5	%	80,5	%	80,5 0	%	100, 00	%			80, 50	%	100,0 0	%
2.14.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%			24	bulan	67	%
2.14.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%			24	bulan	67	%
2.14.0 1.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%			24	bulan	67	%
2.14.0 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%			24	bulan	67	%
2.14.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%			24	bulan	67	%
2.14.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%			24	bulan	67	%
2.14.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggara an Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%			24	bulan	67	%
2.14.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,5	%	80,5	%	80,5	%	-	%	-	%			%	-	%	
2.14.0 1.2.07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	7	Unit					-	Unit	#DIV /0!	%			-	0	-	%
2.14.0 1.2.07. 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana/Prasarana Sistem Informasi Data Keluarga	1	paket	1	paket			-	paket	#DIV /0!	%			1	paket	100	%

2.14.0 1.2.07. 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelengkapan Balai Penyuluhan KB	6	Unit						-	Unit	#DIV/0!	%			-	0	-	%	
2.14.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,5	%	80,5	%	80,5	%	80,5	%	100	%			80,5	%	100	%		
2.14.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%			24	bulan	67	%
2.14.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	36	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%			24	bulan	67	%
2.14.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,5	%	80,5	%	80,5	%	80,5	%	100,0	%			80,5	%	100,0	%		
2.14.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional	36	bulan	3	unit	12	bulan	12	unit	100	%			15	unit	42	%		
2.14.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional	36	bulan	5	unit	12	bulan	12	unit	100	%			17	unit	47	%		
2.14.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Balai Penyuluhan yang direhabilitasi (Dak Fisik), jumlah Kegiatan	24	unit	5	unit	19	unit	19	unit	100	%				unit	100	%		

	Sistem Informasi Keluarga	Sistem Informasi Keluarga																
2.14.0 2.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Keluarga	1	dokumen								1	dokumen	-	dokumen	-	%	
2.14.0 2.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	36	Fasyankes								36	Fasyankes			-	%	
2.14.0 2.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1	Dokumen								1	Dokumen	-	Bulan	-	%	
2.14.0 3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Capaian CPR	73	%								73	%	-	%	-	%	
2.14.0 3.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar	12	Bulan								12	Bulan	6	Bulan	50	%	
2.14.0 3.2.01.01	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yg mendapatkan Advokasi Bangsa Kencana	12	bulan								12	bulan	6	bulan	50	%	
2.14.0 3.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar	12	bulan								12	bulan	6	bulan	50	%	

2.14.0 3.2.01. 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Proram KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Proram KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10	Laporan								10	Laporan	2	Laporan	20	%
2.14.0 3.2.01. 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan yang Mendapat Dukungan Operasional Kegiatan	18	balai peny								18	balai peny	18	balai peny	100	%
2.14.0 3.2.01. 08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1	Laporan								1	Laporan	-	%	-	%
2.14.0 3.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Prosentase Pembinaan Pendayaagunaan oleh PKB/PLKB di Lini Lapangan dan Penggerakan IMP	100	%								100	%	15,04	%	15,04	%
2.14.0 3.2.02. 01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Persentase Pemberian Biaya Operasional Pembinaan Program oleh Kader PPKBD/ Sub PPKBD	100	%								100	%	-	%	-	%
2.14.0 3.2.02. 03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	3	Laporan								3	Laporan	-	Bulan	-	%

2.14.0 3.2.02. 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang mengikuti penggerakan Kader IMP	1378	orang								1378	orang	-	orang	-	%
2.14.0 3.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100	%								100	%	7,13	%	7,13	%
2.14.0 3.2.03. 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang Terdistribusi Alokon	83	faskes								83	faskes	-	faskes	-	%
2.14.0 3.2.03. 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	30	akseptor								30	akseptor	10	akseptor	33	%
2.14.0 3.2.03. 04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	20	kasus								20	kasus	-	kasus	-	%
2.14.0 3.2.03. 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah unit Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	23	unit								23	unit	-	unit	-	%
2.14.0 3.2.03. 07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah calon peserta KB yang mendapatkan Pelayanan KIE	60	orang								60	orang	-	orang	-	%

2.14.0 3.2.03. 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	Laporan							1	Laporan	-	akseptor	-	%
2.14.0 3.2.03. 09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	375	orang							375	orang	-	akseptor	-	%
2.14.0 3.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Prosentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100	%							100	%	35,44	%	35,44	%
2.14.0 3.2.04. 01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	jumlah Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3	kegiatan							3	kegiatan	2	kegiatan	67	%
2.14.0 3.2.04. 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana	3	kegiatan							3	kegiatan	2	%	67	%

2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga	73	%								73	%	-	%	-	%
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	%								100	%	35,13	%	35,13	%
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	3	klp								3	klp	-	klp	-	%
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20	unit								20	unit	-	Kelompok	-	%

2.14.0 4.2.01. 05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Bina Keluarga yang mendapatkan Pembinaan dan Biaya Operasional	235	kader								235	kader	470	kader	200	%
2.14.0 4.2.01. 07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta kegiatan Promosi dan Sosialisasi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	125	orang								125	orang	-	orang	-	%
2.14.0 4.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	%								100	%	-	%	-	%

2.14.0 4.2.02. 02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta pertemuan dalam rangka Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50	orang								50	oran g	-	orang	-	%
2.14.0 4.2.02. 03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Peserta Pembinaan dan peningkatan usaha UPPKS	65	orang								65	oran g	-	orang	-	%
2.14.0 4.2.02. 04	Promosi dan Sosialisai Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Pameran unggulan produk UPPKA / Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Mitra Kerja	1	Kegiata n								1	Kegia tan			-	%
2.08.0 3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terlayannya Jumlah Korban Kekerasan Kepada Perempuan	100	Korba n								100	Korb an	80	%	80	%

2.08.0 3.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Laporan								1	Laporan	1,51	%	151,00	%
2.08.0 3.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Laporan								1	Laporan	-	dokumen	-	%
2.08.0 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Untuk tercapainya KLA	76	%								76	%	-	%	-	%
2.08.0 6.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media 150 orang dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen								1	Dokumen	-	%	-	%
2.08.0 6.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media 150 orang dan Dunia	1	dokumen								1	dokumen	-	dokumen	-	%

		Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta	43	%								43	%	-	%	-	%	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	2	Dokumen								2	Dokumen	-	%	-	%	
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	2	dokumen								2	dokumen	-	dokumen	-	%	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1	Dokumen								1	Dokumen	-	%	-	%	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi partisipasi perempuan	1	Dokumen								1	Dokumen	-	orang	-	%	

2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masy	80,5	Skor								80,5	Skor	skor	100,0	%	
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan	12	Bulan									12	Bulan	6	dokumen	50	%
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	8	dokumen									8	dokumen	2	dokumen	25	%
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan									6	Laporan		dokumen	-	%
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Bulan									12	Bulan	6	Bulan	50	%
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan									12	bulan	3	bulan	25	%
2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan	2	dokumen									2	dokumen	3	dokumen	150	%
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Kantor	12	Bulan									12	Bulan	6	Bulan	50	%
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan									12	bulan	6	bulan	50	%
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan									12	bulan	6	bulan	50	%

2.14.0 1.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga	12	bulan								12	bulan	6	bulan	50	%
2.14.0 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	bulan								12	bulan	6	bulan	50	%
2.14.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan								12	bulan	6	bulan	50	%
2.14.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	bulan								12	bulan	6	bulan	50	%
2.14.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	bulan								12	bulan	6	bulan	50	%
2.14.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	%								80	%	-	%	-	%
2.14.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Kantor	12	Bulan								12	Bulan	6	Bulan	50	%
2.14.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12	bulan								12	bulan	6	bulan	50	%
2.14.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12	bulan								12	bulan	6	bulan	50	%
2.14.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional	12	Bulan								12	Bulan	3	Bulan	25	%

2.14.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional	12	bulan								12	bula n	6	unit	50	%
2.14.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional	12	bulan								12	bula n	3	unit	25	%
2.14.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Balai Penyuluhan yang direhabilitasi (Dak Fisik), jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Kantor	19	unit								19	unit	-	unit	-	%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja Dinas PPKB PP dan PA berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik IKK maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2019-2023 berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Dinas PPKB PP dan PA serta norma dan standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan terkait kinerja pelayanan urusan perencanaan pembangunan.

Hasil Pencapaian kinerja pelayanan Dinas PPKB PP dan PA sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

No	INDIKATOR	SPM/ STANDART NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI 2023	CATATAN ANALISIS
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022		
I	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
1	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	-	-	61,35	61,36	61,37	61,38	70,51	66,63	66,68	70,50	71,45	70,51	
2	Rasio Kekerasan terhadap anak	-	-	0,07	0,06	0,05	0,04	0,02	0,04	0,06	0,03	0,02	0,02	
II	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	-	-	2,17	2,16	2,15	2,14	2,09	2,16	2,10	2,13	2,10	2,09	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	-	-	76,5	76,7	76,90	77,1	73,00	70,44	72,98	74,50	71,86	73,00	
3	Rata-rata usia kawin pertama wanita	-	-	20,1	20,3	20,50	20,8	24,71	23,34	23,12	24,89	24,7	24,71	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Permasalahan yang dihadapi Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan pada setiap tujuan/sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan melalui program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

2.3.1 Pengaturan Kelahiran melalui Kesertaan ber KB

Di Kabupaten Magetan, pelayanan dan sosialisasi keluarga berencana telah berhasil menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Magetan dan terlihat adanya peningkatan partisipasi peserta KB setiap tahunnya. Pada prinsipnya perempuan dan laki-laki mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama dalam meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi dan pelaksanaan KB ini. Namun masih terlihat adanya kesenjangan dalam partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan KB dimana jumlah perempuan sebagai akseptor 97.86% dibandingkan akseptor laki-laki sebesar 2.14% .

Rendahnya persentase partisipasi pria dalam kegiatan KB disebabkan :

- (1) Sosialisasi dan pembinaan tentang Pemakaian Alat Kontrasepsi Lebih banyak terhadap perempuan,
- (2) Pandangan umum tentang KB lebih banyak ditujukan terhadap perempuan dari pada kepada laki-laki,
- (3) Keterbatasan pilihan alat kontrasepsi untuk laki-laki,
- (4) Belum adanya kesepakatan ulama tentang masalah MOP,
- (5) Kurangnya pembinaan dan kontrol terhadap laki-laki dalam hal memutuskan partisipasi untuk ber KB.

Rendahnya kesadaran dan pelaksanaan KB laki-laki maka Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan perlu melakukan reformasi kebijakan dan rencana aksi bersama dengan Balai Pemyuluhan KB seKabupaten Magetan untuk membentuk keluarga berkualitas sejahtera dan bahagia.

2.3.2 Kesadaran Tentang Kesehatan Reproduksi di Kalangan Remaja dan Ibu- ibu

Di Kabupaten Magetan hampir di setiap kecamatan sudah terdapat kelompok-kelompok PIK Remaja baik yang dikelola oleh Desa maupun Sekolah-sekolah. Tetapi akibat kurangnya pembinaan serta fasilitas pendukung yang kurang memadai, maka kelompok PIK Remaja ini belum berfungsi secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus kenakalan remaja dan penyimpangan seksual di kalangan remaja dan siswa.

Untuk Ibu-ibu atau PUS yang sudah aktif seksual ternyata masih banyak yang belum paham tentang pentingnya deteksi dini kanker leher rahim (pap smear). Hal ini dibuktikan bahwa tidak semua kecamatan melaksanakan kegiatan pap smear diakibatkan animo masyarakat terhadap kegiatan pap smear masih rendah. Oleh karena itu ke depan perlu koordinasi dan kerja sama yang baik antara Dinas PPKB PP dan PA dengan lintas sektor untuk menyukseskan program pap smear ini.

2.3.3 Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Di kabupaten Magetan sudah terbentuk kelompok Bina Keluarga Balita yang tersebar di setiap Posyandu. Permasalahan

yang dihadapi adalah belum optimalnya fungsi kelompok BKB dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini disebabkan kader BKB masih banyak yang belum paham tentang fungsi BKB itu sendiri. Selain itu honor kader BKB oleh pemerintah sangat minim dan belum merata, sehingga dalam bekerja sifatnya hanya sukarela saja. Ke depan Dinas PPKB PP dan PA akan memberikan fasilitas BKB Kit untuk semua kelompok BKB yang ada dan direncanakan setiap kelompok BKB akan mendapat dana operasional.

2.3.4 Peningkatan Keadilan Gender serta Peningkatan Rasa Aman Bagi Perempuan dan Anak.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai sasaran ini antara lain adalah pada kegiatan Sosialisasi Undang-undang Perlindungan Perempuan dan Anak. Setelah diadakan sosialisasi tentang Undang-undang Perlindungan Perempuan dan Anak, diharapkan terjadi pemahaman yang baik tentang Undang-undang kepada masyarakat atau peserta sosialisasi. Tetapi kenyataannya masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama penelantaran ekonomi di Kabupaten Magetan. Hal ini perlu dikaji ulang tentang mekanisme sosialisasi UUPA juga peserta sosialisasi.

Selain itu permasalahan yang dihadapi adalah banyak masyarakat korban tindak kekerasan merasa malu untuk melaporkan ke pihak berwewenang, sehingga kasus KDRT semakin meningkat.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan untuk membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan kebutuhan Perangkat Daerah, terutama terkait dengan hasil analisis kinerja pelayanan yang tidak berhasil atau kurang maksimal, sehingga perlu mendapatkan pendanaan yang lebih besar atau merubah jenis kegiatan agar dicapai hasil yang optimal. Review juga dilakukan terhadap program/kegiatan yang tidak terdapat dalam rancangan awal Perangkat Daerah atau ketidak sesuaian program/kegiatan maupun besarnya.

Pada Rancangan Awal Perangkat Daerah ini, belum ada perubahan pagu anggaran baik program dan kegiatan setelah direview.

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

RANCANGAN AWAL 2024						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	KET.
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Ketersediaan Data Kependudukan	Kabupaten Magetan	100	495.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Ketersediaan Data Kependudukan	Kabupaten Magetan	100	385.000.000	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Pertemuan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kabupaten Magetan	1	300.000.000	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Pertemuan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kabupaten Magetan	1	235.000.000	
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kabupaten Magetan	1	300.000.000	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Kabupaten Magetan	1	235.000.000	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	Kabupaten Magetan	1	195.000.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	Kabupaten Magetan	1	150.000.000	
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Kabupaten Magetan	24	75.000.000	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Kabupaten Magetan	24	60.000.000	
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan	Kabupaten Magetan	1	20.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan	Kabupaten Magetan	1	15.000.000	

RANCANGAN AWAL 2024						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	KET.
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga					Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Kabupaten Magetan	1	100.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Kabupaten Magetan	1	75.000.000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase Capaian CPR	Kabupaten Magetan	71,9	1.847.000.000	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase Capaian CPR	Kabupaten Magetan	71,90	836.582.937	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Kabupaten Magetan	12	100.000.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Kabupaten Magetan	12	60.000.000	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kabupaten Magetan	1	100.000.000	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kabupaten Magetan	1	60.000.000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Prosentase Pembinaan Pendayagunaan oleh PKB/PLKB di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kabupaten Magetan	100	1.187.000.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Prosentase Pembinaan Pendayagunaan oleh PKB/PLKB di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kabupaten Magetan	100	416.582.937	
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga	Kabupaten Magetan	1	205.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kabupaten Magetan	1	55.000.000	

RANCANGAN AWAL 2024						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	KET.
		Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)					untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kabupaten Magetan	1378	982.000.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kabupaten Magetan	1378	361.582.937	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan	Kabupaten Magetan	100	490.000.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan	Kabupaten Magetan	100	310.000.000	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kabupaten Magetan	100	150.000.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kabupaten Magetan	100	60.000.000	
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kabupaten Magetan	30	50.000.000	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kabupaten Magetan	1	30.000.000	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Magetan	18	120.000.000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Magetan	18	120.000.000	
2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kabupaten Magetan	70	50.000.000	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kabupaten Magetan	445	100.000.000	
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kabupaten Magetan	375	120.000.000	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kabupaten Magetan	375		

RANCANGAN AWAL 2024						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	KET.
		Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan					Kesehatan dan Kelompok Kegiatan				
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kabupaten Magetan	100	70.000.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kabupaten Magetan	100	50.000.000	
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kabupaten Magetan	6	70.000.000	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kabupaten Magetan	6	50.000.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga	Kabupaten Magetan	73	740.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga	Kabupaten Magetan	73	405.000.000	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Magetan	100	550.000.000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Magetan	100	325.000.000	

RANCANGAN AWAL 2024						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	KET.
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kabupaten Magetan	3	100.000.000	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kabupaten Magetan	3	40.000.000	
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Magetan	235	300.000.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kabupaten Magetan	235	200.000.000	
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Magetan	1	50.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Magetan	1	35.000.000	
2.14.04.2.01.14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kabupaten Magetan	200	100.000.000	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kabupaten Magetan	200	50.000.000	

RANCANGAN AWAL 2024						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	KET.
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Magetan	100	190.000.000	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Magetan	100	80.000.000	
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Magetan	1	100.000.000	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Magetan	1	25.000.000	
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Magetan	2	50.000.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Magetan	2	25.000.000	
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kabupaten Magetan	1	40.000.000	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kabupaten Magetan	1	30.000.000	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	Prosentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta	Kabupaten Magetan	43	200.000.000	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	Prosentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta	Kabupaten Magetan	43	170.000.000	

RANCANGAN AWAL 2024						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	KET.
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Magetan	2	50.000.000	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Magetan	2	50.000.000	
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Magetan	2	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Magetan	2	50.000.000	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Magetan	2	150.000.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Magetan	2	120.000.000	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Magetan	2	150.000.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Magetan	2	120.000.000	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terlayannya jumlah korban kekerasan kepada perempuan	Kabupaten Magetan	100	330.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terlayannya jumlah korban kekerasan kepada perempuan	Kabupaten Magetan	100	300.000.000	
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Kabupaten Magetan	1	330.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Kabupaten Magetan	1	300.000.000	

RANCANGAN AWAL 2024						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	KET.
		Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Magetan	1	330.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Magetan	1	300.000.000	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Untuk tercapainya Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kabupaten Magetan	76	150.000.000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Untuk tercapainya Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kabupaten Magetan	76	100.000.000	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Magetan	1	150.000.000	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Magetan	1	100.000.000	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kabupaten Magetan	1	150.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kabupaten Magetan	1	100.000.000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Peningkatan SDM Masyarakat tentang Bahaya Kekerasan	Kabupaten Magetan	1	200.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Peningkatan SDM Masyarakat tentang Bahaya Kekerasan	Kabupaten Magetan	1	200.000.000	

RANCANGAN AWAL 2024						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	KET.
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Kabupaten Magetan	1	120.000.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Kabupaten Magetan	1	120.000.000	
2.08.07.7.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Magetan	1	120.000.000	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Kabupaten Magetan	1	120.000.000	
2.08.07.2.03	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan Manajemen Peningkatan SDM	Kabupaten Magetan	1	80.000.000	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan Manajemen Peningkatan SDM	Kabupaten Magetan	1	80.000.000	
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Magetan	1	80.000.000	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kabupaten Magetan	1	80.000.000	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kabupaten Magetan	80,5	5.983.388.045	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN DPPKBPPPA terhadap Layanan Kesekretariatan DPPKBPPPA	Kabupaten Magetan	80,50	5.316.560.717	
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	Kabupaten Magetan	14	185.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	Kabupaten Magetan	14	125.000.000	
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Magetan	8	85.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Magetan	8	50.000.000	

RANCANGAN AWAL 2024						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	KET.
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Magetan	6	100.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Magetan	6	75.000.000	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	Kabupaten Magetan	87	3.091.388.045	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	Kabupaten Magetan	87	2.637.660.717	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Magetan	22	3.066.388.045	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Magetan	22	2.612.660.717	
2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Magetan	2	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Magetan	2	25.000.000	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Magetan	12	485.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Magetan	12	360.000.000	
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12	12.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12	12.000.000	
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12	125.000.000	
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12	22.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12	22.000.000	
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12	30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12	30.000.000	
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12	17.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12	17.000.000	
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Kabupaten Magetan	12	4.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Magetan	12	4.000.000	

RANCANGAN AWAL 2024						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	KET.
		Perundang-Undangan yang Disediakan					Undangan yang Disediakan				
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Magetan	12	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Magetan	12	150.000.000	
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Magetan	1	872.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Magetan	1	872.000.000	
2.14.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Magetan	1	872.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Magetan	1	872.000.000	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Magetan	12	1.030.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Magetan	12	1.101.900.000	
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12	45.000.000	
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12	980.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12	1.056.900.000	
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Kabupaten Magetan	164	320.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Kabupaten Magetan	164	220.000.000	
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Magetan	3	95.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Magetan	3	85.000.000	
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Kabupaten Magetan	142	75.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Kabupaten Magetan	142	60.000.000	

RANCANGAN AWAL 2024						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	KET.
	Dinas Operasional atau Lapangan	dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Magetan	19	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Magetan	19	75.000.000	
					9.945.388.045					7.713.143.654	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam Renja tahun 2023 ini tidak terdapat program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui Balai Penyuluhan KB Kecamatan yang diketahui oleh Camat dan melalui Musrenbang Kecamatan.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kabupaten Magetan

Nama Perangkat Daerah : DINAS PPKB PP DAN PA

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
NIHIL					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN
KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat sangat tergantung dari peran serta laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan pemanfaat hasil pembangunan. Pada pelaksanaannya sampai saat ini peran serta kaum perempuan belum dioptimalkan.

Oleh karena itu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan sebagai Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan kependudukan Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai PERBUP Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan adalah merumuskan kebijakan teknis perencanaan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender guna meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam semua sektor pembangunan serta penilaian pelaksanaan.

Program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan dan anak, yang selama ini masih banyak mengalami kendala akibat bias gender yang dapat ditemukan pada semua bidang kehidupan, Pemberdayaan Perempuan merupakan bagian yang tak terpisahkan bahkan mengambil porsi sangat penting dalam pembangunan manusia. Kesejahteraan akan dapat tercapai apabila kualitas hidup perempuan diperhatikan.

Peran Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA) berupaya juga untuk mengoptimalkan perempuan dalam keikut-sertaannya di dalam pembangunan. Melalui Peraturan Pemerintah No 47/2009, Tugas pokok dan fungsi Kementerian PP dan PA adalah:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang PP dan PA;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang PP dan PA;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang PP dan PA.

Arah Prioritas Pembangunan Bidang PP dan PA di Daerah adalah:

1. Pelaksanaan PUG, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di daerah dengan piloting beberapa bidang pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, pertanian dan pekerjaan umum.
2. Perlindungan Perempuan dan Anak, Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
3. Tumbuh kembang Anak
4. Pengembangan Kota Layak Anak.

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan Program Nasional merupakan bagian Integral dari Pembangunan Nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2015 disebutkan bahwa Program KBN merupakan rangkaian pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas sebagai langkah penting dalam mencapai Pembangunan Berkelanjutan, dimana berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dinyatakan bahwa untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan Keluarga berkualitas dilakukan berbagai upaya, yaitu pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan. Implementasi dari upaya tersebut akan menjadikan penduduk sebagai sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, mampu bersaing dengan bangsa lain dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Hal ini selaras dengan arah kebijakan dan strategi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2022, dimana Program KKBPK masuk didalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan (NAWACITA) pada butir ke 5 “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” pada fokus pertama (Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana). Seluruh arah kebijakan dan strategi Pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga harus mengacu pada butir ke 5 Nawacita tersebut dan telah tertuang di dalam RPJMN 2015-2022 serta telah dikembangkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2022.

Penguatan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga telah tertuang didalam RPJMN/Renstra BKKBN 2015-2022 dan pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN/Renstra tersebut (tahun 2015) BKKBN dituntut untuk dapat mencapai target/sasaran diantaranya: ¹⁾ Persentase Laju pertumbuhan Penduduk 0,64, ²⁾ Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) 1,98, ³⁾ Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) 66,8 persen (all method), ⁴⁾ Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 10,60 persen, ⁵⁾ Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun) 30,35 per 1000 kelahiran, ⁶⁾ Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun) 9,7 persen.

Penajaman-penajaman yang harus dilakukan tentunya juga harus tetap mengacu pada Arah Kebijakan dan Strategi pembangunan Bidang Kependudukan dan KB yang terdapat pada Buku I RPJMN 2015-2022 dimana BKKBN bertanggung jawab untuk melakukan:

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan kependudukan, pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta pembangunan keluarga yang merata dan berkualitas
2. Penyediaan sarana dan prasarana program KKBPK, serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB

3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko *drop-out* maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE)
4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KKBPK
5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB
6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja
7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB
8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB
9. Penguatan Bidang KKBPK melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/ kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program KKBPK

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan Rencana Kerja adalah :

1. Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesadaran gender dalam pembangunan serta perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak.

Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)
2. Meningkatnya Pendewasaan Usia Perkawinan
3. Meingkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
4. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

Target sasaran Renja Dinas PPKB PP dan PA tahun 2024 :

Tabel 3.1
Target Sasaran Renja Dinas PPKB PP dan PA Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-
				2024
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Pengendalian Penduduk	1.1	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,61
1.1	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	1.1.1	Total Fertility Rate (TFR)	2,08
		1.1.2	Tingkat Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	71,9
		1.1.3	Prevalensi Deteksi Dini Kanker Serviks (Papsmear)	1,5
1.2	Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)	1.2.1	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP)	24,72
		1.2.2	Persentase wanita berusia 20-24 tahun yang telah menikah atau menikah sebelum berusia 20 tahun (SDGs)	6,95
2	Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat melalui Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	2.1	Indek Peberdayaan Gender (IDG)	71,5
2.1	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	2.1.1	Partisipasi angkatan kerja perempuan	81,75
		2.1.2	Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah	4,6
		2.1.3	Proporsi Kursi yang di duduki Perempuan di DPRD	15,55
2.2	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	2.2.1	Rasio KDRT	0,02 - 0,05
		2.2.2	Persentase Capaian Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	700
		2.2.3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	86,25

No	Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-
				2024
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,5
3.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,5

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dengan memperhatikan pada :

- a. Hasil review terhadap pelaksanaan Renja tahun 2022;
- b. Hasil pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah tahun 2022;
- c. Hasil review terhadap rancangan Perangkat Daerah tahun 2022;
- d. Hasil penelaahan terhadap usulan program/kegiatan masyarakat;
- e. Hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi; serta
- f. Isu-isu/permasalahan penting yang dihadapi selama tahun 2022 dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, yang disandingkan dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana Kerja Tahun 2023

Dengan memperhatikan poin-poin diatas, maka program/ kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas PPKB PP dan PA pada tahun 2024 adalah sebagaimana disampaikan pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

TABEL 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan SKPD dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Magetan

DINAS PPKB PP DAN PA KABUPATEN MAGETAN

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Ketersediaan Data Kependudukan	Kabupaten Magetan	100	385.000.000			100	544.500.000
1	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Pertemuan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kabupaten Magetan	1	235.000.000			1	330.000.000
	2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kabupaten Magetan	1	235.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	330.000.000
2	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	Kabupaten Magetan	1	150.000.000			1	214.500.000

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Kabupaten Magetan	24	60.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		24	82.500.000
	2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kabupaten Magetan	1	15.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	22.000.000
	2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Kabupaten Magetan	1	75.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	110.000.000
II.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase Capaian CPR	Kabupaten Magetan	71,90	836.582.937			72,00	1.957.500.000
1	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Kabupaten Magetan	12	60.000.000			12	110.000.000

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kabupaten Magetan	1	60.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	110.000.000
2	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Prosentase Pembinaan Pendayagunaan oleh PKB/PLKB di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kabupaten Magetan	100	416.582.937			100	1.225.500.000
	2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kabupaten Magetan	1	55.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	225.500.000
	2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kabupaten Magetan	1378	361.582.937	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1378	1.000.000.000

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan	Kabupaten Magetan	100	310.000.000			100	545.000.000
	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kabupaten Magetan	100	60.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		100	165.000.000
	2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kabupaten Magetan	1	30.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		35	55.000.000
	2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Magetan	18	120.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		18	135.000.000
	2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kabupaten Magetan	445	100.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		70	55.000.000

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kabupaten Magetan	375		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		400	135.000.000
4	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kabupaten Magetan	100	50.000.000			100	77.000.000
	2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kabupaten Magetan	6	50.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		6	77.000.000
III.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga	Kabupaten Magetan	73	405.000.000			73	815.000.000

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Magetan	100	325.000.000			100	605.000.000
	2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kabupaten Magetan	3	40.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		3	110.000.000
	2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Magetan	235	200.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		235	330.000.000

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Magetan	1	35.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	55.000.000
	2.14.04.2.01.14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kabupaten Magetan	200	50.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		200	110.000.000
2	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Magetan	100	80.000.000			100	210.000.000

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Magetan	1	25.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	110.000.000
	2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Magetan	2	25.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	55.000.000
	2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kabupaten Magetan	1	30.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	45.000.000

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta	Kabupaten Magetan	43	170.000.000			43	220.000.000
1	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Magetan	2	50.000.000			2	55.000.000
	2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Magetan	2	50.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		2	55.000.000
2	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Magetan	2	120.000.000			2	165.000.000

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Magetan	2	120.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		2	165.000.000
V.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terlayannya jumlah korban kekerasan kepada perempuan	Kabupaten Magetan	100	300.000.000			100	360.000.000
1	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Magetan	1	300.000.000			1	360.000.000
	2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Magetan	1	300.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	360.000.000
VI.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Untuk tercapainya Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kabupaten Magetan	76	100.000.000			76	165.000.000

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Magetan	1	100.000.000			1	165.000.000
	2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kabupaten Magetan	1	100.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	165.000.000
VII.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Peningkatan SDM Masyarakat tentang Bahaya Kekerasan	Kabupaten Magetan	1	200.000.000			10	200.000.000
1	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Kabupaten Magetan	1	120.000.000			1	120.000.000
	2.08.07.7.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Magetan	1	120.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	120.000.000

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2.08.07.2.03	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan Manajemen Peningkatan SDM	Kabupaten Magetan	1	80.000.000			1	80.000.000
	2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Magetan	1	80.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	80.000.000
VIII.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kabupaten Magetan	80,50	5.316.560.717			80,60	6.192.888.045
1	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	Kabupaten Magetan	14	125.000.000			14	203.500.000
	2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Magetan	8	50.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		8	93.500.000

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Magetan	6	75.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		6	110.000.000
2	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	Kabupaten Magetan	87	2.637.660.717			87	3.093.888.045
	2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Magetan	22	2.612.660.717	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		22	3.066.388.045
	2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Magetan	2	25.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		2	27.500.000
3	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Magetan	12	360.000.000			12	538.000.000
	2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12	12.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		12	15.000.000

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12	125.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		12	220.000.000
	2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12	22.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		12	25.000.000
	2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12	30.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		12	33.000.000
	2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12	17.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		12	20.000.000
	2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12	4.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		12	5.000.000
	2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Magetan	12	150.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		12	220.000.000

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Magetan	1	872.000.000			1	900.000.000
	2.14.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Magetan	1	872.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	900.000.000
5	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Magetan	12	1.101.900.000			12	1.105.000.000
	2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12	45.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		12	55.000.000
	2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12	1.056.900.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		12	1.050.000.000
6	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Kabupaten Magetan	164	220.000.000			164	352.500.000
	2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Magetan	3	85.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		3	105.000.000

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Magetan	142	60.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		142	82.500.000
	2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Magetan	19	75.000.000	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		19	165.000.000
						7.713.143.654				10.454.888.045

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja ini disusun sebagai pelaksanaan / penjabaran Renstra Dinas PPKB PP dan PA 2024 - 2026 secara tahunan. Rancangan Rencana Kerja mempunyai nilai guna yang penting karena keberhasilan Visi, Misi dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra sangat tergantung pada perencanaan tahunan yang disusun.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan anggaran tahun 2024 dan Perjanjian Kinerjanya. Selain itu Rancangan Akhir Rencana Kerja ini juga berfungsi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Tupoksi dan pencapaian kinerja selama tahun 2024 nanti.

Kedepan diharapkan Rancangan Rencana Kerja ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya guna meningkatkan dan memperbaiki keberhasilan kinerja yang belum tercapai.

Magetan, Agustus 2023
KEPALA DINAS PPKB PP DAN PA
KABUPATEN MAGETAN

Dra. FURIANA KARTINI
Pembina Utama Muda
NIP 19660421 199003 2 013